

Analisis Penyusunan Rencana Anggaran Pendanaan Satuan Pendidikan Islam: Kajian Operasional Dan Teknis

Anis Fitria^{1*}, Haitsam², Mardiyah²

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

anisftr84@gmail.com¹, haitsambswd11@gmail.com², ummi.mardiyah@uinsa.ac.id³

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: anisftr84@gmail.com

Abstract Budget planning in Islamic educational institutions is a crucial factor in ensuring the sustainability and effectiveness of financial management. This article analyzes the strategies for preparing budget plans in Islamic educational institutions from operational and technical perspectives. Proper planning ensures the optimal allocation of resources to support the learning process, facility maintenance, and quality improvement in education. This study highlights the importance of transparency, accountability, and the use of performance-based approaches in budget management. Additionally, government regulations, stakeholder involvement, and the utilization of technology are key factors in enhancing the efficiency and effectiveness of budget planning in Islamic education. The findings of this study are expected to provide insights for Islamic education administrators in developing a more structured and sustainable financial strategy.

Keywords: budget planning, Islamic educational institutions, financial management, transparency, accountability

Abstrak. Perencanaan anggaran dalam satuan pendidikan Islam merupakan faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan keuangan lembaga. Artikel ini menganalisis strategi penyusunan rencana anggaran pendanaan satuan pendidikan Islam dari perspektif operasional dan teknis. Perencanaan yang baik memastikan optimalisasi alokasi sumber daya untuk mendukung proses pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas pendidikan. Studi ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, regulasi pemerintah, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan anggaran pendidikan Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola pendidikan Islam dalam menyusun strategi keuangan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kata kunci : Perencanaan anggaran, satuan pendidikan Islam, pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan anggaran untuk institusi pendidikan Islam adalah komponen penting yang menentukan seberapa efektif pengelolaan keuangan dalam mendukung pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Anggaran yang dirancang dengan baik akan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembayaran tenaga pendidik, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengadaan bahan ajar. Sekolah Islam dapat menghadapi masalah keuangan yang dapat mengurangi kualitas pendidikan.

Perencanaan anggaran yang baik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan institusi pendidikan Islam. Dengan anggaran yang terstruktur, pengelola pendidikan dapat menunjukkan kepada pihak terkait, seperti yayasan, pemerintah,

atau masyarakat, bagaimana dana digunakan. Transparansi dalam pengelolaan dana juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Islam, yang memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan dukungan finansial, baik melalui dana pemerintah maupun kontribusi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang, diperlukan perencanaan anggaran yang baik. Satuan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk belajar, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan dengan benar dapat membantu berbagai program pengembangan kurikulum dan membantu tenaga pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, perencanaan anggaran mempengaruhi tidak hanya keberlanjutan operasional tetapi juga pencapaian tujuan dan visi sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung.

Perencanaan anggaran yang cermat juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan nasional dan peraturan akuntansi yang berlaku dalam konteks peraturan. Dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah Indonesia telah mengatur sistem pendanaan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Satuan pendidikan Islam dapat mendapatkan akses ke dana pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dana hibah lainnya dengan mematuhi peraturan yang ada, yang dapat memperkuat stabilitas keuangan organisasi.

Terakhir, lembaga pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri dengan kesulitan keuangan dan perubahan kebutuhan pendidikan dengan menggunakan anggaran yang direncanakan dengan baik. Kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat di era globalisasi dan digitalisasi, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Institusi pendidikan Islam dapat menggunakan anggaran yang fleksibel untuk investasi dalam teknologi, memberikan pelatihan kepada guru, dan meningkatkan infrastruktur digital yang mendukung pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, perencanaan anggaran sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan pendidikan Islam di masa mendatang.

Institusi pendidikan Islam menghadapi banyak masalah yang rumit saat menyusun anggaran. Keterbatasan sumber daya keuangan adalah salah satunya. Meskipun pemerintah telah memberikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan, anggaran tersebut seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan operasional dan pengembangan institusi pendidikan Islam. Akibatnya, pengelola harus mengoptimalkan pembiayaan dan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk memastikan program pendidikan tetap berlanjut.

Selain itu, tantangan lain terletak pada manajemen keuangan yang efektif. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kurangnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat menghambat efisiensi penggunaan dana dan menurunkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi manajerial dan penerapan praktik manajemen keuangan yang baik dalam lembaga pendidikan Islam.

Anggaran harus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pendidikan. Institusi pendidikan Islam harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kurikulum. Ini memerlukan dana. Namun, inovasi pendidikan sering dihalangi oleh keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pendidikan harus membuat perencanaan anggaran yang fleksibel dan mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung dana untuk program inovatif Islam. Mereka juga perlu mengembangkan rencana tindakan yang memungkinkan mereka untuk mendukung program-program tersebut.

Dalam perencanaan anggaran, kajian operasional dan teknis sangat penting, terutama dalam pendidikan Islam. Perencanaan operasional melibatkan pembuatan strategi dan tindakan konkret untuk mencapai tujuan organisasi. Lembaga pendidikan Islam dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan benar dengan melakukan kajian operasional yang mendalam..

Selain itu, kajian teknis dalam perencanaan anggaran memungkinkan organisasi untuk memahami secara detail komponen-komponen biaya yang terlibat dalam setiap aktivitas. Dengan analisis teknis yang tepat, organisasi dapat membuat anggaran yang realistis dan akurat, menghindari overestimasi atau underestimasi biaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dan mendukung keberlanjutan operasional organisasi.

Selain itu, penggabungan studi teknis dan operasional dalam perencanaan anggaran membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan. Organisasi dapat menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan monitoring yang efektif jika mereka memahami aspek operasional dan teknis secara menyeluruh. Ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan mendeteksi penyimpangan anggaran sejak dini dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi dan prinsip dasar anggaran pendidikan

Anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber daya guna mendukung berbagai kegiatan dalam lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendidikan mencakup alokasi dana pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran pendidikan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip akurasi, yaitu memastikan bahwa estimasi pendapatan dan pengeluaran dilakukan dengan tepat untuk mencegah kesalahan dan ketidakseimbangan antara jumlah anggaran dan mutu pendidikan.

Kedua, prinsip transparansi, yang menuntut keterbukaan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar semua pihak terkait dapat mengakses informasi dengan mudah. Ketiga, prinsip akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, prinsip efisiensi dan efektivitas juga menjadi landasan penting dalam penganggaran pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal, sementara efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai melalui alokasi dana yang ada. Penerapan kedua prinsip ini memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, prinsip partisipasi menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, dan masyarakat, dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi ini memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan demikian, dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dapat diperoleh untuk implementasi program-program pendidikan.

Terakhir, prinsip fleksibilitas harus diperhatikan dalam penganggaran pendidikan. Fleksibilitas memungkinkan penyesuaian anggaran terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan yang mungkin terjadi selama periode anggaran berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat merespons dinamika dan tantangan yang muncul tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Jenis-jenis anggaran dalam satuan Pendidikan

Dalam pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan, anggaran memegang peran penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Terdapat berbagai jenis anggaran yang diterapkan dalam konteks pendidikan, masing-masing dengan tujuan dan fungsi spesifik untuk mendukung operasional dan pengembangan institusi pendidikan.

Salah satu jenis anggaran yang umum digunakan adalah Anggaran Butir per Butir (Line-Item Budget). Anggaran ini merinci setiap pos pengeluaran secara detail, seperti gaji staf, pembelian peralatan, dan biaya pemeliharaan. Keunggulan dari anggaran ini adalah kemudahan dalam pengawasan dan kontrol, karena setiap pengeluaran telah ditetapkan dalam pos tertentu. Namun, kekurangannya terletak pada kurangnya fleksibilitas, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama periode anggaran.

Selain itu, terdapat Anggaran Program (Program Budget) yang berfokus pada pendanaan untuk program atau kegiatan tertentu. Dalam anggaran ini, dana dialokasikan berdasarkan program yang direncanakan, seperti program peningkatan kualitas guru atau pengembangan kurikulum. Pendekatan ini memungkinkan institusi untuk menilai efektivitas setiap program secara lebih jelas, namun memerlukan perencanaan yang matang dan sistem evaluasi yang baik untuk memastikan tujuan program tercapai.

Anggaran Kinerja (Performance Budget) adalah jenis anggaran yang mengaitkan pendanaan dengan hasil atau output yang diharapkan. Misalnya, alokasi dana didasarkan pada jumlah siswa yang lulus atau peningkatan nilai rata-rata. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan menekankan pada hasil yang dicapai. Namun, penerapan anggaran kinerja memerlukan sistem pengukuran dan pelaporan yang akurat untuk menilai kinerja secara objektif.

Terakhir, Anggaran Fleksibel (Flexible Budget) memberikan keleluasaan bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan alokasi dana berdasarkan perubahan kondisi atau kebutuhan yang tidak terduga. Jenis anggaran ini berguna dalam menghadapi situasi yang dinamis, seperti perubahan jumlah siswa atau kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun menawarkan fleksibilitas, penting bagi institusi untuk memiliki mekanisme kontrol yang baik agar penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Pemilihan jenis anggaran yang tepat sangat bergantung pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Dengan memahami berbagai jenis anggaran yang ada, institusi pendidikan dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif,

memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.

Regulasi pemerintah tentang pendanaan pendidikan Islamk.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur pendanaan pendidikan Islam guna memastikan penyelenggaraan pendidikan yang adil, memadai, dan berkelanjutan. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Bab XIII yang membahas pembiayaan pendidikan. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi minimal 20% untuk sektor pendidikan. Selain itu, Pasal 47 menegaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Untuk lebih spesifik mengatur pendidikan agama dan keagamaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama sepenuhnya ditangani oleh Menteri Agama, termasuk dalam hal pendanaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan Islam, memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk operasional dan pengembangannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menjadi tonggak penting dalam regulasi pendanaan pendidikan Islam. Undang-undang ini tidak hanya mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga memberikan landasan hukum bagi pendanaan dan pengembangan pesantren. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pesantren dapat lebih mandiri dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi lebih signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber pendanaan satuan pendidikan Islam (APBN, APBD, dana masyarakat, hibah, dll.)

Satuan pendidikan Islam di Indonesia memperoleh pendanaan dari berbagai sumber untuk memastikan operasional dan pengembangan yang berkelanjutan. Salah satu sumber utama adalah alokasi dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.

Selain pendanaan dari pemerintah, partisipasi masyarakat juga menjadi sumber dana penting bagi satuan pendidikan Islam. Kontribusi ini dapat berasal dari orang tua siswa dalam bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sumbangan sukarela, serta dukungan dari kelompok masyarakat atau individu yang peduli terhadap pendidikan Islam. Sumber dana dari masyarakat ini membantu menutupi kebutuhan yang mungkin tidak terjangkau oleh dana pemerintah, seperti pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, dan program peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, satuan pendidikan Islam juga dapat menerima dana dari sumber lain yang sah, seperti hibah, wakaf, zakat, dan sedekah. Sumber-sumber ini, meskipun tidak selalu rutin, dapat memberikan dukungan finansial tambahan yang signifikan, terutama untuk proyek-proyek khusus atau pengembangan infrastruktur. Pengelolaan dana dari berbagai sumber ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pendekatan tradisional vs. pendekatan berbasis kinerja

Dalam manajemen pendidikan, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi: pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan tradisional menekankan pada hierarki yang ketat, di mana manajemen puncak menetapkan sasaran umum yang kemudian diturunkan menjadi sub-tujuan oleh bawahan. Setiap tingkatan dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan proses yang telah ditetapkan. Pendekatan ini sering kali kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan lingkungan eksternal.

Sebaliknya, pendekatan berbasis kinerja menitikberatkan pada hasil dan output yang dicapai oleh organisasi. Dalam pendekatan ini, penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, dengan memberikan otonomi lebih besar kepada individu atau tim untuk mencapai target mereka. Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses kerja.

Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini terletak pada fokus dan fleksibilitasnya. Pendekatan tradisional cenderung berfokus pada proses dan kepatuhan terhadap prosedur, sementara pendekatan berbasis kinerja lebih menekankan pada pencapaian

hasil dan adaptabilitas. Pemilihan pendekatan yang tepat bergantung pada konteks dan tujuan organisasi, serta kemampuan untuk menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas dalam operasionalnya.

Analisis kebutuhan dan perencanaan anggaran

Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dalam suatu sistem atau organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk memahami kebutuhan yang ada dan menentukan prioritas dalam perencanaan. Dalam konteks pengembangan program pendidikan, analisis kebutuhan membantu memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi aktual di lapangan.

Perencanaan berbasis data adalah pendekatan yang memanfaatkan data empiris untuk membuat keputusan yang informasional dan akurat. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama analisis kebutuhan, perencana dapat mengidentifikasi masalah utama, menentukan akar penyebabnya, dan merancang solusi yang tepat sasaran. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dikembangkan, karena keputusan didasarkan pada bukti nyata daripada asumsi semata.

Integrasi antara analisis kebutuhan dan perencanaan berbasis data menghasilkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata. Dengan memahami kesenjangan yang ada melalui analisis kebutuhan dan menggunakan data untuk merancang intervensi, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal dan tujuan program tercapai dengan lebih efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi berkelanjutan, sehingga program dapat disesuaikan seiring waktu berdasarkan data terbaru dan perubahan kebutuhan.

Analisis kebutuhan dan perencanaan berbasis data

Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dalam suatu sistem atau organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk memahami kebutuhan yang ada dan menentukan prioritas dalam perencanaan. Dalam konteks pengembangan program pendidikan, analisis kebutuhan membantu memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi aktual di lapangan.

Perencanaan berbasis data adalah pendekatan yang memanfaatkan data empiris untuk membuat keputusan yang informasional dan akurat. Dengan menggunakan data yang

dikumpulkan selama analisis kebutuhan, perencana dapat mengidentifikasi masalah utama, menentukan akar penyebabnya, dan merancang solusi yang tepat sasaran. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dikembangkan, karena keputusan didasarkan pada bukti nyata daripada asumsi semata.

Integrasi antara analisis kebutuhan dan perencanaan berbasis data menghasilkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata. Dengan memahami kesenjangan yang ada melalui analisis kebutuhan dan menggunakan data untuk merancang intervensi, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal dan tujuan program tercapai dengan lebih efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi berkelanjutan, sehingga program dapat disesuaikan seiring waktu berdasarkan data terbaru dan perubahan kebutuhan.

- **Faktor Operasional dan Teknis dalam Perencanaan Anggaran**

Standar biaya operasional satuan pendidikan Islam

Standar biaya operasional untuk satuan pendidikan Islam di Indonesia diatur oleh pemerintah guna memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Komponen biaya operasional ini meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan beserta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan habis pakai, serta biaya operasional pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Selain itu, untuk pendidikan tinggi keagamaan Islam, Kementerian Agama telah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur komponen dan besaran biaya operasional yang diperlukan oleh perguruan tinggi keagamaan negeri, termasuk universitas Islam negeri dan institut agama Islam negeri. Komponen biaya tersebut mencakup biaya operasional langsung dan tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien.

Implementasi standar biaya operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan Islam memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pendidikan dengan baik. Dengan adanya standar ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Namun, tantangan dalam penerapan standar ini

masih ada, terutama terkait dengan disparitas kemampuan finansial antar daerah dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mengatasinya.

Perencanaan dan distribusi anggaran

Perencanaan anggaran dalam lembaga pendidikan Islam merupakan proses krusial yang menentukan efektivitas dan efisiensi operasional institusi. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui analisis mendalam terhadap berbagai aspek, seperti kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas, dan program pendidikan. Dengan pemahaman yang komprehensif, lembaga dapat merumuskan tujuan dan strategi yang selaras dengan visi dan misi mereka. Perencanaan yang baik memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kebutuhan aktual.

Distribusi anggaran yang efektif memerlukan alokasi dana yang tepat ke berbagai komponen pendidikan, termasuk kegiatan di dalam dan luar sekolah, serta kegiatan penunjang lainnya. Alokasi yang tepat memastikan bahwa setiap aspek operasional mendapatkan dukungan finansial yang memadai, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi distribusi anggaran harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara rinci, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Tantangan dan kendala teknis dalam penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran dalam lembaga pendidikan Islam sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang manajemen keuangan. Kurangnya tenaga profesional yang memahami prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan anggaran dapat mengakibatkan perencanaan keuangan yang kurang optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi kendala signifikan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki sistem informasi keuangan yang memadai, sehingga proses penyusunan dan pengawasan anggaran masih dilakukan secara manual. Hal ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Beberapa lembaga mungkin belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif, sehingga sulit untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan dan menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menyediakan kedalaman perencanaan yang komprehensif dan anggaran di lembaga pendidikan Islam, seperti yang dijelaskan dalam dokumen; Studi ini menggunakan studi kasus beberapa unit untuk pendidikan Islam, dan ia adalah peneliti dari berbagai praktik manajemen anggaran yang digunakan di berbagai lembaga.

Metode perekaman data termasuk wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan seperti direktur, akuntan, dan guru. Wawancara ini memungkinkan para peneliti untuk melihat informasi terperinci tentang proses perencanaan anggaran, implementasi, dan penilaian keuangan di semua lembaga. Selain itu, pengamatan langsung dilakukan untuk menerima dan mempercayai informasi dari wawancara dan dukungan yang akurat, dan untuk benar-benar mengamati proses manajemen anggaran. Pengumpulan data juga mencakup analisis dokumen seperti rencana aktivitas madrasa dan anggaran (RKAM). Ini memberikan gambaran tentang bagaimana Institut mengatur dan mendistribusikan sumber daya keuangannya.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, termasuk langkah-langkah seperti transkripsi, pengkodean, persiapan tema, dan triangulasi, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi potensial dalam mengelola anggaran pendidikan Islam. Ini mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif.

Oleh karena itu, keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk meningkatkan perencanaan dan manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam, dan untuk memberikan peningkatan yang lebih luas dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendorong lembaga pendidikan untuk melaksanakan operasi secara efisien, tetapi juga untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam kebutuhan pendidikan dan memastikan keberlanjutan program pendidikan berkualitas tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi operasional dan cara teknis pengisian rencana pendanaan satuan pendidikan Islam

Rencana pendanaan pada satuan pendidikan Islam merupakan bagian integral dari perencanaan operasional yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Perencanaan ini mencakup penetapan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Rencana operasional, atau sering disebut sebagai *planning of action (POA)*, adalah rencana jangka pendek yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis akan dilaksanakan. Dalam konteks pendidikan Islam, rencana operasional berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara teknis, pengisian rencana pendanaan dimulai dengan melakukan analisis konteks secara menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP), kondisi internal satuan pendidikan, dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan atau masalah yang dihadapi, kemudian menetapkan skala prioritas untuk program atau kegiatan yang perlu dilaksanakan. Setelah itu, satuan pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang memuat detail perencanaan anggaran, seperti jenis kegiatan, sumber pendanaan, rincian belanja, dan estimasi biaya. RKAM ini kemudian diajukan untuk disahkan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama setempat.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, satuan pendidikan Islam dapat memanfaatkan aplikasi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Melalui aplikasi ini, satuan pendidikan dapat melakukan login, mengisi detail informasi penanggung jawab, mengaktifkan kertas kerja

pada menu penganggaran, dan mengisi rincian perencanaan anggaran secara digital. Setelah semua data terinput, pengajuan pengesahan dapat dilakukan secara elektronik, memudahkan proses penelaahan dan persetujuan oleh pihak terkait

b. Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan Islam

Tahapan Penyusunan Anggaran

Kebutuhan operasional dalam satuan pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang esensial untuk memastikan proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Salah satu komponen utama adalah perencanaan strategis dan operasional yang matang. Perencanaan strategis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, perencanaan operasional berfokus pada implementasi langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua jenis perencanaan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Selain perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana juga menjadi kebutuhan operasional yang krusial. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi, harus diterapkan dengan baik dalam lembaga pendidikan Islam.

Sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, merupakan elemen vital dalam operasional pendidikan Islam. Ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kompeten dan merata menjadi tantangan tersendiri. Beberapa daerah mengalami kekurangan guru PAI akibat kebijakan moratorium, pensiun, dan distribusi yang tidak merata. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang kurang optimal. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan dan distribusi tenaga pendidik harus menjadi prioritas dalam manajemen operasional.

Manajemen mutu juga menjadi kebutuhan operasional yang penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan penerapan manajemen mutu yang komprehensif. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek operasional lembaga pendidikan. Dengan demikian,

lembaga pendidikan Islam dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kebutuhan operasional satuan pendidikan Islam meliputi perencanaan strategis dan operasional yang efektif, pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik yang kompeten, serta penerapan manajemen mutu yang berkelanjutan. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini akan memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat berfungsi secara optimal dan mencapai tujuan pendidikannya.

Keterlibatan Stakeholder dalam perencanaan anggaran

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran merupakan elemen krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Publika, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan menghasilkan rencana yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi, memberikan masukan, serta memastikan bahwa anggaran publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Namun, implementasi partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran sering menghadapi tantangan, seperti ego sektoral dari sebagian stakeholder, keterbatasan anggaran dana, dan landasan hukum yang belum kuat. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan mengidentifikasi bahwa masih terdapat kendala dalam koordinasi antar-stakeholder yang perlu diatasi untuk mencapai perencanaan anggaran yang efektif dan inklusif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam proses perencanaan anggaran. Pembentukan forum pemangku kepentingan, seperti yang diusulkan dalam Buku Saku Pembentukan Forum Pemangku

Kepentingan, dapat menjadi solusi efektif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Secara keseluruhan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif, perencanaan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan memastikan bahwa penggunaan dana publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kebutuhan operasional satuan Pendidikan islam

Kebutuhan operasional pada satuan pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang mendukung kelancaran proses pendidikan. Salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai dalam lingkungan madrasah merupakan faktor penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan.

Selain itu, kebutuhan akan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional juga menjadi prioritas. Ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memadai sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. Namun, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan jumlah guru PAI yang ideal, yang disebabkan oleh kebijakan moratorium, pensiun, dan distribusi yang tidak merata.

Manajemen strategis dan operasional yang efektif juga menjadi kebutuhan penting dalam satuan pendidikan Islam. Perencanaan strategis berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga, sementara perencanaan operasional memastikan implementasi program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua jenis perencanaan ini harus melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, karena menyangkut pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai pembiayaan operasional yang terbesar. Manajemen pembiayaan yang baik akan mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kualitas pendidikan.

Terakhir, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif menjadi komponen penting yang menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana, seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi, harus diterapkan dengan baik untuk memastikan fasilitas pendidikan selalu dalam kondisi optimal dan mendukung proses pembelajaran.

Strategi alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan operasional

Strategi alokasi anggaran yang efektif berdasarkan kebutuhan operasional sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan organisasi. Langkah pertama dalam strategi ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan operasional secara komprehensif. Hal ini melibatkan penilaian mendalam terhadap semua aspek operasional, termasuk sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan memahami kebutuhan ini, organisasi dapat mengalokasikan anggaran secara tepat dan menghindari pemborosan.

Setelah kebutuhan operasional diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap tujuan organisasi. Dengan menentukan prioritas, organisasi dapat memastikan bahwa dana dialokasikan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang paling krusial, sehingga operasional utama dapat berjalan tanpa hambatan. Pendekatan ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.

Penerapan metode penganggaran yang sesuai juga merupakan bagian penting dari strategi alokasi anggaran. Salah satu metode yang efektif adalah penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana didasarkan pada pencapaian kinerja tertentu. Metode ini mendorong efisiensi dan akuntabilitas, karena setiap unit atau departemen harus mencapai target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan anggaran yang dialokasikan.

Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran juga penting untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan melakukan pemantauan rutin, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Evaluasi ini juga memberikan wawasan untuk perencanaan anggaran di masa mendatang, sehingga proses alokasi dana dapat terus ditingkatkan.

Terakhir, fleksibilitas dalam alokasi anggaran menjadi kunci untuk menghadapi perubahan atau situasi tak terduga. Dengan memiliki cadangan anggaran atau kemampuan

untuk menyesuaikan alokasi dana, organisasi dapat merespons dinamika operasional dengan lebih efektif tanpa mengganggu keseluruhan operasional. Fleksibilitas ini memastikan bahwa organisasi tetap adaptif dan mampu mempertahankan kinerja optimal meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga.

c. Aspek Teknis Dalam Penyusunan Anggaran

Mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan

Mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan pendidikan merupakan komponen vital dalam manajemen keuangan yang efektif. Proses ini dimulai dengan perencanaan anggaran, di mana institusi pendidikan menyusun rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya keuangan, memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan institusi. Menurut Depdiknas (2000), manajemen keuangan mencakup tindakan pengurusan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat secara sistematis dan kronologis. Dokumen pendukung seperti kwitansi, faktur, dan nota harus disimpan dengan baik sebagai bukti transaksi. Pencatatan yang akurat memungkinkan institusi untuk memantau arus kas dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Siklus akuntansi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap: pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Tahap akhir adalah pelaporan keuangan, di mana informasi yang telah dicatat dirangkum menjadi laporan keuangan yang komprehensif. Laporan ini biasanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan institusi kepada para pemangku kepentingan, termasuk manajemen, dewan pengawas, dan pihak eksternal lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik juga membantu dalam proses audit dan evaluasi. Dengan memiliki catatan yang lengkap dan laporan yang jelas, auditor dapat menilai kepatuhan institusi terhadap peraturan dan

kebijakan yang berlaku. Selain itu, evaluasi terhadap laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil keputusan yang lebih informasional untuk masa depan.

Penerapan standar akuntansi yang relevan, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 untuk organisasi nirlaba, juga penting dalam memastikan konsistensi dan keandalan laporan keuangan. Dengan mengikuti standar ini, institusi pendidikan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan praktik terbaik dan memenuhi persyaratan regulasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas institusi, tetapi juga memudahkan dalam proses pengawasan dan evaluasi oleh pihak eksternal.

Peran teknologi dalam pengelolaan anggaran

Peran teknologi dalam pengelolaan anggaran lembaga pendidikan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang menekankan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Salah satu inovasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan, serta dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, pengembangan sistem keuangan sekolah berbasis teknologi juga berperan dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan SDLC (Software Development Life Cycle) dengan studi kasus di beberapa sekolah menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis teknologi dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Integrasi administrasi pendidikan berbasis teknologi juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara administrasi dan manajemen pendidikan yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung oleh kebijakan yang jelas, pelatihan sumber daya manusia, dan teknologi yang memadai.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran lembaga pendidikan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga mendukung

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangan mereka dengan lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran memegang peran vital dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam karena menyangkut efektivitas pengalokasian sumber daya keuangan, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi institusi. Perencanaan yang matang menjadi dasar penting untuk menjamin kelancaran operasional, penentuan prioritas kegiatan, serta monitoring arus kas agar pengeluaran tidak melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan. Kendati demikian, banyak lembaga pendidikan Islam masih mengalami kendala dalam aspek manajerial, terutama terkait kapasitas penganggaran dan pelaporan keuangan. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola lembaga dalam bidang manajemen keuangan serta penerapan sistem dan aplikasi digital seperti ARKAS guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, pengelolaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang utama dalam proses pembelajaran, yang membutuhkan perencanaan dan investasi berkelanjutan agar fasilitas pendidikan tetap optimal dan mampu menjawab tantangan zaman. Dukungan pemerintah melalui regulasi seperti PP No. 55 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam, namun implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan keselarasan di tingkat institusi. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan Islam melakukan perbaikan menyeluruh dalam aspek manajerial dan finansial dengan menerapkan strategi anggaran yang fleksibel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terbuka terhadap kerja sama lintas sektor untuk penguatan dana dan inovasi pendidikan. Langkah ini tidak hanya akan mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap eksistensi dan kontribusinya dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, A. (n.d.). Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam lembaga pendidikan Islam: Tantangan dan solusi.
- Asri, A., Siregar, N. A. N., Liza, S., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2024). Pengembangan sistem keuangan sekolah berbasis teknologi untuk mendukung transformasi Society 5.0. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 216–224. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.351>
- Azzahra, A. F., Rahmi, N., Sabri, A., & Hidayatullah, R. (2024). Integrasi administrasi pendidikan berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia era Society 5.0. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 863–878. <https://doi.org/10.57171/jt.v5i6.587>
- Bagaskoro, B., & Jihan, A. (2017). Analisis anggaran operasional dan realisasinya sebagai alat bantu manajemen dalam penilaian kinerja perusahaan (Studi kasus Oakwood Premier Cozmo Jakarta) (No. 3).
- Bire, K. (n.d.). Perencanaan operasional dalam organisasi.
- Darwinsyah, M., & Nugroho, R. (n.d.). Jalan panjang regulasi pendidikan Islam di Indonesia. Volume 6(1).
- Erfiyana, E., & Maulana, A. H. (n.d.). Strategi perencanaan pendidikan Islam.
- Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin, S. (2023). Kebijakan pemerintah tentang standar pembiayaan pendidikan agama Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 114–120. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.65>
- Fitriani, Y., & Tohiri, M. K. (2024). Analisis manajemen pembiayaan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan Islam (Literature review). Volume 1(1).
- Hidayah, N., Ridwan, A., & Azis, A. (2024). Tantangan dan solusi dalam implementasi manajemen pendidikan Islam di era modern. Volume 2.
- Hidayati, S. (n.d.). Inovasi dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan. I. *jurnal.pdf*. (2025, February 13). Retrieved from https://repository.unmuhjember.ac.id/2967/9/i.%20JURNAL.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Kartika, D., Mujahidin, E., Indra, H., Indupurnahayu, I., & Andriana, N. (2023). Perencanaan keuangan lembaga pendidikan Islam. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 134–155. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i1.35887>
- Masrianda, M. (2022). Konsep dasar manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam pengelolaan serta pengalokasian dana pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 193–202. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826>

- Napitupulu, D. S. (n.d.). Manajemen alokasi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam.
- Nuryasin, M., & Mitrohardjono, M. (2019). Strategi perencanaan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Volume 4(2).
- Raniwihati, S., & Djasuli, M. (2024). Implementasi ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan sektor pendidikan. Volume 13(3).
- Ridwan, A., & Sakdiyah, H. (2022). Analisis sumber dana pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Hibrul Ulama*, 4(1), 19–27. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i1.168>
- Samsidar, E., & Nazir, A. (2021a). Rencana strategis dan rencana operasional dalam lembaga pendidikan Islam. *Al-Khair Journal: Management Education*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.29300/al-khair.v1i1.2492>
- Samsidar, E., & Nazir, A. (2021b). Rencana strategis dan rencana operasional dalam lembaga pendidikan Islam. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.29300/kh.v1i1.5444>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Volume 08(1).
- Suhendra, J. A., Rangkuti, S., & Zahri, C. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran dan realisasi biaya operasional terhadap kinerja perusahaan pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 191–202. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4526>
- Ulfa, N. A. (2013). Pengelolaan sistem keuangan daerah dengan sistem anggaran berbasis kinerja.
- Untung, S., & Afiqoh, A. (2023). Manajemen keuangan pendidikan Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(2), 130. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i2.18926>
- Winarno, W., & Untung, S. (2024). Strategi manajemen sarana dan prasarana pendidikan agama Islam dalam mendukung proses belajar siswa. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 1006–1019. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5025>
- Zikrawahyu, Z. (2024). Analisis efektivitas perencanaan anggaran perguruan tinggi agama Islam dalam mencapai tujuan strategis. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(2). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2215>